



PERAN PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI YANG BERKEADABAN

Navaro Dzaky

Email: varodzzaky@gmail.com

Universitas Islam Negeri Rade Intan Lampung

abstrak. Pancasila sebagai dasar ideologi negara memiliki peran fundamental dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang berkeadaban di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya memberikan arah etis dan moral bagi penyelenggaraan demokrasi yang tidak hanya menekankan aspek prosedural, tetapi juga mengutamakan keadaban, kemanusiaan, serta tanggung jawab sosial. Implementasi Pancasila dalam praktik demokrasi menciptakan ruang partisipasi publik yang inklusif, menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai pedoman utama dalam membangun demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa dan berorientasi pada keadilan serta keharmonisan sosial.

Kata Kunci: Pancasila, demokrasi, keadaban, nilai-nilai Pancasila, kehidupan berbangsa.

Abstract . Pancasila, as the state ideology, plays a fundamental role in realizing a civilized democratic life in Indonesia. The values contained in each of its principles provide ethical and moral direction for the implementation of democracy, emphasizing not only procedural aspects but also prioritizing civility, humanity, and social responsibility. The implementation of Pancasila in democratic practice creates a space for inclusive public participation, ensures respect for human rights, and encourages transparent and in-depth governance. Thus, Pancasila serves as the primary guideline for building a democracy that aligns with the nation's character and is oriented toward justice and social harmony.

Keywords: Pancasila, democracy, civility, Pancasila values, national life.

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran fundamental dalam membentuk arah penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam era modern yang ditandai oleh keterbukaan informasi, dinamika politik yang cepat, serta meningkatnya partisipasi masyarakat, demokrasi menjadi sistem yang tak terpisahkan dari kehidupan politik nasional. Namun demikian, praktik demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai luhur bangsa yang termaktub dalam Pancasila.¹

Demokrasi yang berkembang tanpa landasan moral berpotensi menimbulkan praktik kebebasan yang kebablasan, konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, hingga mudahnya rasa persatuan. Oleh karena itu, Pancasila hadir sebagai pedoman etis dan filosofis untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia bukan hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan berkeadaban. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial memberikan kerangka komprehensif agar proses demokrasi berlangsung dengan menjunjung tinggi martabat manusia, menjaga keberagaman, serta menegakkan prinsip musyawarah dan keadilan.

¹ Zainudin, Hasan, Pancasila Dan Kewarganegaraan Bandar Lampung : UBL Press, 2025

Dalam konteks globalisasi, penetrasi budaya asing, dan tantangan sosial-politik seperti polarisasi, intoleransi, serta disinformasi, peran Pancasila semakin penting sebagai filter moral dan ideologis. Pancasila memberikan arah agar kebebasan berpendapat, pemilihan umum, dan partisipasi politik tetap dilakukan secara bertanggung jawab dan mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang menghargai etika, hukum, dan persatuan.

Dengan demikian, penguatan peran Pancasila dalam kehidupan demokrasi menjadi keharusan untuk membangun masyarakat yang tidak hanya bebas berpendapat, tetapi juga berperilaku santun, menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama. Demokrasi yang berkeadaban hanya dapat terwujud apabila seluruh komponen bangsa menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan dalam kehidupan sosial dan politik.

Di tengah tantangan globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta dinamika sosial-politik, penguatan peran Pancasila menjadi semakin mendesak. Arus informasi yang tidak terbandung, masuknya ideologi asing, dan meningkatnya individualisme dapat melemahkan karakter demokrasi bangsa jika tidak disertai pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai Pancasila. Demokrasi tanpa moral dapat memicu konflik, hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, serta berkurangnya solidaritas sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam praktik kehidupan demokrasi serta faktor-faktor yang memengaruhi keberadaban demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-nilai Pancasila memperkuat praktik demokrasi yang berkeadaban karena Pancasila menyediakan landasan moral, etika, dan arah perilaku politik yang menjaga demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga bermartabat, menghargai manusia, dan menjunjung persatuan. Berikut penjelasannya:²

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Memberikan dasar moral dan spiritual dalam kehidupan politik. Mendorong perilaku demokratis yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Mengingat bahwa kebebasan dalam demokrasi harus tetap menghormati nilai religius dan tidak melanggar norma etika.

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Menegaskan bahwa demokrasi harus menempatkan manusia sebagai pusat penghormatan. Mengurangi praktik kekerasan, ujaran kebencian, diskriminasi, dan politik identitas. Mendorong penghormatan pada hak asasi manusia dan keadilan sosial.

c. Sila Persatuan Indonesia

Menguatkan semangat kebersamaan dalam keberagaman. Menjadi penyeimbang konflik politik akibat perbedaan suku, agama, maupun pilihan politik. Mencegah demokrasi terpecah oleh polarisasi dan ideologi ekstrem.

² Kaelan. (2016). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma

- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Memberikan pedoman bagi mekanisme demokrasi yang sehat. Menekankan musyawarah untuk mufakat, bukan hanya voting, sehingga keputusan lebih adil dan tidak menimbulkan konflik. Mengarahkan wakil rakyat untuk bertindak bijaksana, tidak koruptif, dan berpihak pada rakyat.
- e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Menjadi tujuan akhir demokrasi yang berkeadaban. Menjamin bahwa hasil demokrasi membawa kesejahteraan, bukan hanya keuntungan bagi kelompok tertentu. Mendukung lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada seluruh warga.³

Faktor Yang Menyebabkan Nilai Pancasila Kurang Terinternalisasi Dalam Kehidupan Demokrasi Masyarakat Saat Ini

- 1. Pengaruh Globalisasi dan Arus Informasi yang Tidak Terkendali
 - a. Masuknya ideologi asing yang lebih individualistis atau liberal secara ekstrem
 - b. Media sosial yang sering memicu polarisasi, hoaks, ujaran kebencian, dan politik identitas.
 - c. Minimnya literasi digital membuat masyarakat mudah terpengaruh informasi yang tidak sesuai nilai Pancasila.
- 2. Lemahnya Pendidikan Pancasila di Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat
 - a. Pembelajaran Pancasila sering dianggap formalitas dan tidak menyentuh aspek sikap serta praktik nyata.
 - b. Kurangnya keteladanan dari pendidik dan lingkungan sekitar.
 - c. Minimnya integrasi nilai Pancasila dalam kegiatan sosial dan budaya sehari-hari.
- 3. Kurangnya Keteladanan dari Pemimpin dan Elite Politik
 - a. Praktik demokrasi sering dicemari oleh politik uang, ujaran kebencian, kampanye negatif, dan konflik kepentingan.
 - b. Ketidakkonsistenan elite dalam menjalankan prinsip keadilan, kejujuran, dan musyawarah, sehingga menurunkan kepercayaan publik dan memengaruhi perilaku masyarakat.
- 4. Lunturnya Semangat Gotong Royong dan Solidaritas Sosial
 - a. Fokus masyarakat pada kepentingan pribadi dan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan bersama.
- 5. Minimnya Penegakan Hukum dan Ketidakadilan Sosial
 - a. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih tinggi.
 - b. Ketidakadilan hukum yang memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap nilai keadilan yang diajarkan Pancasila.
 - c. Demokrasi tanpa keadilan sosial membuat masyarakat tidak merasakan manfaat nyata nilai Pancasila.
- 6. Polarisasi Politik dan Identitas
 - a. Penggunaan isu SARA dalam kontestasi politik.
 - b. Polarisasi yang memecah masyarakat sehingga prinsip persatuan dan musyawarah mufakat melemah.

³ Latif, Y. (2018). Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

7. Kurangnya Internalisasi Melalui Kebijakan Publik
 - a. Nilai Pancasila belum sepenuhnya diwujudkan dalam kebijakan ekonomi, hukum, dan sosial.
 - b. Jika kebijakan tidak menghadirkan rasa keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan, masyarakat sulit merasakan relevansi Pancasila.⁴

Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Dan Media Sosial Terhadap Penerapan Nilai Pancasila Dalam Budaya Berdemokrasi

Namun di sisi lain, media sosial juga menghadirkan tantangan besar terhadap internalisasi nilai-nilai Pancasila. Arus informasi yang cepat dan tanpa filter memudahkan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, polarisasi politik, serta fenomena echo chamber yang mempersempit ruang dialog rasional. Kondisi ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan, persatuan, serta demokrasi yang berkeadaban. Selain itu, anonimitas di dunia digital sering membuat masyarakat kurang mengutamakan etika, toleransi, dan tanggung jawab dalam berpendapat.⁵

Dengan demikian, perkembangan teknologi informasi dan media sosial berpengaruh signifikan terhadap budaya demokrasi Indonesia. Dampak positifnya perlu terus dimaksimalkan melalui literasi digital, penguatan karakter berbasis Pancasila, serta regulasi yang berpihak pada etika publik. Tanpa upaya tersebut, tantangan negatif dari ruang digital dapat melemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan demokrasi yang berkeadaban.

1. Pengaruh Positif
 - a. Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Media sosial memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, mengkritisi kebijakan pemerintah, serta terlibat dalam diskusi politik. Hal ini memperkuat implementasi sila ke-4 Pancasila tentang “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”
 - b. Mempercepat Akses Informasi dan Transparansi

Informasi kebijakan pemerintah atau isu publik dapat diakses dengan cepat. Masyarakat dapat lebih mudah mengawasi jalannya pemerintahan (public oversight). Penyebaran informasi yang cepat ini mendukung nilai keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas.
 - c. Menumbuhkan Ruang Diskusi Publik yang Inklusif

Media sosial memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berdialog tanpa batasan geografis. Hal ini dapat memperkuat nilai persatuan (Sila ke-3) dan kemanusiaan (Sila ke-2) bila digunakan secara bijak.
 - d. Mendukung Gerakan Sosial yang Berbasis Nilai Kemanusiaan

Aksi solidaritas, penggalangan donasi, advokasi HAM, atau kampanye isu sosial semakin mudah dilakukan melalui media digital. Fenomena ini mencerminkan penguatan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

⁴ Afandi, A. (2020). *Demokrasi Pancasila dan Tantangan Globalisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁵ Ahyar, M., & Alfitri. (2019). Demokrasi, masyarakat sipil, dan tantangan nilai Pancasila di era digital. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 34(2), 112–120.

2. Pengaruh Negatif

a. Maraknya Hoaks dan Disinformasi

Kecepatan penyebaran informasi sering tidak diiringi verifikasi. Hal ini memicu kesalahpahaman, konflik, dan ketegangan sosial. Penyebaran hoaks bertentangan dengan nilai kejujuran dan kebijaksanaan dalam Pancasila.

b. Polarisasi dan Konflik Identitas

Media sosial menjadi ruang berkembangnya ujaran kebencian, intoleransi, cyberbullying, serta provokasi politik. Polarisasi ini mengancam nilai persatuan bangsa dan toleransi.

c. Lunturnya Etika dan Tanggung Jawab dalam Berpendapat

Banyak pengguna media sosial merasa bebas berkomentar tanpa mempertimbangkan etika, moral, dan dampak sosial. Sikap ini tidak sesuai dengan sila ke-2 (kemanusiaan) dan sila ke-5 (keadilan sosial).

d. Budaya Demokrasi yang Superfisial

Demokrasi digital sering berujung pada clicktivism—aktivitas politik sebatas “like”, “share”, atau komentar tanpa pemahaman mendalam. Ini menciptakan demokrasi instan yang tidak berlandaskan nilai kebijaksanaan.

Sejauh Pancasila Mampu Menjadi Pedoman Moral Dan Etika Dalam Mencegah Penyimpangan Demokrasi Seperti Ujaran Kebencian, Hoaks, Dan Intoleransi

Pancasila memiliki fungsi fundamental sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan pedoman moral yang mengarahkan kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam konteks pencegahan penyimpangan demokrasi seperti ujaran kebencian, hoaks, dan intoleransi, Pancasila bekerja melalui nilai-nilai filosofis dan praktis yang dapat membentuk karakter masyarakat dan cara mereka berpartisipasi dalam ruang publik.⁶

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini menanamkan nilai moralitas, kejujuran, dan etika dalam perilaku warga negara. Dalam konteks demokrasi:

- a. Menolak perilaku yang merugikan sesama seperti menyebarkan hoaks karena bertentangan dengan ajaran moral ketuhanan.
- b. Mendorong masyarakat menjaga ucapan dan tindakan, sehingga tidak melakukan ujaran kebencian yang memecah belah.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ini menekankan penghormatan terhadap martabat manusia serta budaya beradab dalam berkomunikasi.

- a. Ujaran kebencian jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan merendahkan martabat orang lain.⁷

⁶ Kominfo RI, “Laporan Hoaks Nasional dan Penanggulangannya”, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023..

⁷ Rahmad, D. (2020). Tantangan demokrasi modern dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(3), 254–263.

- b. Hoaks dapat mencelakai orang atau kelompok, sehingga tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan.
 - c. Intoleransi adalah bentuk pelanggaran atas penghargaan terhadap keberagaman manusia.
3. Persatuan Indonesia
- Sila ini menjadi tameng utama terhadap:
- a. Intoleransi, karena intoleransi melemahkan rasa persatuan.
 - b. Hoaks dan hate speech yang sering memicu konflik horizontal.
 - c. Polarisasi politik akibat informasi palsu
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- Demokrasi Pancasila menekankan:
- a. dialog,
 - b. musyawarah,
 - c. kebijaksanaan,
 - d. mengedepankan akal sehat.

Nilai ini mendorong warga untuk tidak gegabah menerima atau menyebarkan informasi, sehingga:

- a. menjadi filter alami terhadap hoaks,
 - b. mencegah sikap emosional yang melahirkan ujaran kebencian,
 - c. menjaga kualitas diskusi publik agar tetap rasional dan santun.
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- Sila ini mengingatkan bahwa demokrasi harus menjamin:
- a. rasa keadilan,
 - b. perlakuan yang setara bagi setiap warga negara.

Hoaks, hate speech, dan intoleransi sering digunakan untuk mendiskriminasi kelompok tertentu. Pancasila menolak praktik tersebut karena menghambat tercapainya keadilan sosial,

Kontribusi terhadap pencegahan penyimpangan demokrasi:

- a. Hoaks yang memecah belah dapat diminimalisasi karena nilai persatuan mengajak masyarakat bersikap kritis sebelum mempercayai informasi.
- b. Ujaran kebencian yang mengancam kerukunan antar kelompok dapat ditekan dengan menanamkan spirit kebangsaan.
- c. Intoleransi digantikan dengan kesadaran bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa, bukan ancaman.

Secara keseluruhan, Pancasila sangat mampu menjadi pedoman moral dan etika dalam mencegah penyimpangan demokrasi karena mengandung nilai-nilai dasar yang:

- 1. Mengendalikan perilaku moral masyarakat (Sila 1 & 2).
- 2. Menjaga persatuan dan toleransi dalam keberagaman (Sila 3).
- 3. Mengarahkan praktik demokrasi yang bijaksana dan bertanggung jawab (Sila 4).
- 4. Menjamin keadilan sosial agar tidak muncul konflik dan ketegangan (Sila 5).

Kontribusi untuk pencegahan:

- a. Intoleransi sering muncul dari rasa ketidakadilan; sila ini menekankan pemerataan akses dan kesempatan.
- b. Hoaks sering memanfaatkan isu ketidakadilan sosial untuk memprovokasi masyarakat.
- c. Mendorong terciptanya tatanan yang adil sehingga setiap warga merasa dihargai.⁸

KESIMPULAN.

Pancasila berperan penting sebagai dasar etis dan pedoman moral dalam membangun demokrasi yang berkeadaban di Indonesia. Nilai-nilai setiap sila mengarahkan praktik demokrasi agar tidak hanya menekankan kebebasan politik, tetapi juga menjunjung tinggi kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Meski penerapannya masih menghadapi kendala seperti polarisasi politik, penyebaran hoaks, lemahnya keteladanan pemimpin, dan rendahnya pemahaman masyarakat, Pancasila tetap memiliki kemampuan kuat untuk memperkuat kualitas demokrasi. Dengan komitmen bersama untuk mengimplementasikan nilai-nilainya secara konsisten, Pancasila dapat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan demokrasi Indonesia yang bermoral, inklusif, dan berkeadilan.

Meski demikian, Pancasila tetap memiliki kapasitas kuat sebagai pedoman etis untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Dengan penguatan pendidikan Pancasila, peningkatan literasi digital, konsistensi penegakan hukum, serta komitmen dari seluruh elemen bangsa, nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan demokrasi Indonesia yang bermartabat, harmonis, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2020). *Demokrasi Pancasila dan Tantangan Globalisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahyar, M., & Alfitri. (2019). Demokrasi, masyarakat sipil, dan tantangan nilai Pancasila di era digital. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 34(2), 112–120.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Latif, Y. (2018). *Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmad, D. (2020). Tantangan demokrasi modern dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(3), 254–263.
- Kominfo RI, “Laporan Hoaks Nasional dan Penanggulangannya”, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023.
- BNPT, “Pedoman Pencegahan Penyebaran Ujaran Kebencian”, 2021.
- Zainudin, Hasan, *Pancasila Dan Kewarganegaraan Bandar Lampung* : Universitas Bandar Lampung (Ubl) (2025).

⁸ BNPT, “Pedoman Pencegahan Penyebaran Ujaran Kebencian”, 2021.